

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN INFRASTRUKTUR PANJANG
JALAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
EMPAT KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

Sonya Carolina Bria

01021381419201

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

LEMBAR PERSERTUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN INFRASTRUKTUR PANJANG JALAN
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO EMPAT KOTA DI
SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh,

Nama : Sonya Carolina Bria

NIM : 01021381419201

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian seminar proposal

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 19 Maret 2018

Ketua: Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.

NIP. 196007101987031003

Tanggal: 5 April 2018

Anggota: Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.

NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Belanja Modal Dan Infrastruktur Panjang Jalan Terhadap PDRB Empat Kota Di Sumatera Selatan

Disusun Oleh:

Nama : Sonya Carolina Bria
NIM : 01021381419201
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian Komprehensif pada tanggal 19 April 2018 dan telah memenuhi syarat yang diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 19 April 2018

Ketua




Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Anggota




Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

Anggota

2x/4


Dr. Azwardi, S.E., M.Si.
NIP. 196805181993031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si.
NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sonya Carolina Bria
NIM : 0121381419201
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“Pengaruh Belanja Modal dan Infrastruktur Panjang Jalan Terhadap PDRB Empat
Kota Di Sumatera Selatan”

Pembimbing :

Ketua : Prof. H. Didik Susetyo, M.Si.

Anggota : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.

Tanggal diuji : 19 April 2018

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan
hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan
apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut
predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 19 April 2018
Pembuat Pernyataan

Sonya Carolina Bria

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Belanja Modal dan Infrastruktur Panjang Jalan Terhadap Produk Regional Bruto Empat Kota Di Sumatera Selatan**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya selama ini.
3. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Pengelola Akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan Kampus Palembang.
7. Dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat.

Palembang, 9 April 2018

Sonya Carolina Bria

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL DAN INFRASTRUKTUR JALAN
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO EMPAT KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

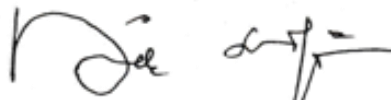
Sonya Carolina Bria; H. Didik Susetyo; Anna Yulianita

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuklinggau menggunakan data sekunder yang datanya tercantum di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan (DGPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect* menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan infrastruktur panjang jalan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,993619 yang berarti bahwa variasi variabel ini dalam menentukan PDRB sangat kuat.

Kata Kunci: Belanja Modal, Infrastruktur Panjang Jalan, PDRB, *Data Panel*, *Fixed Effect*

Telah disetujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Anggota



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si
NIP. 196610141992031003

ABSTRACT

INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE AND ROAD LENGTH
INFRASTRUCTURE TO DOMESTIC REGIONAL PRODUCTS BRUTO
FOUR CITY IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

By:

Sonya Carolina Bria; H. Didik Susetyo; Anna Yulianita

The purpose of this research is to analyze the influence of capital expenditure variable and road length infrastructure to Gross Regional Domestic Product (PDRB) in Palembang City, Prabumulih City, Pagaralam City and Lubuklinggau City using secondary data whose data are listed on the official website of Directorate General Tax and Finance and Central Bureau of Statistics . The result of panel data estimation by Random Effect method shows that capital expenditure has positive and significant effect to Domestic Regional Products Bruto. While the road length infrastructure has a negative and significant effect to the GRDP. The value of coefficient of determination R^2 amounted to 0.993619 which means that the variation of this variable in determining the Domestic Regional Products Bruto is very strong.

Keywords: Capital Expenditure, Road Length Infrastructure, PDRB, Data Panel, Fixed Effect

It has been approved to be placed on an abstract sheet.

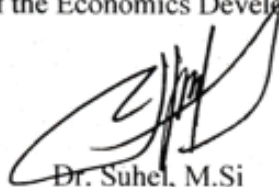
Chairman:


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003


Member


Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

Knowing,
Chairman of the Economics Development Major


Dr. Suhel, M.Si
NIP. 196610141992031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Sonya Carolina Bria
	NIM	: 0121381419201
	Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 11 November 1996
	Alamat	: Jl. Demang Lebar Daun Lorong Gembira No. 12
	Handphone	: 082186137220
AGAMA	: Islam	
JENIS KELAMIN	: Perempuan	
STATUS	: Belum Menikah	
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia	
TINGGI	: 160 cm	
BERAT BADAN	: 48 kg	
KEGEMARAN	: Traveling	
EMAIL	: sonyacarolina1111@gmail.com	
PENDIDIKAN		
2001-2002	TK YKAI Palembang	
2002-2008	SD Xaverius 4 Palembang	
2008-2011	SMP Xaverius 2 Palembang	
2011-2014	SMA Xaverius 3 Palembang	
2014-2018	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik	11
2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik	12
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	14
2.1.3 Teori Penerimaan Negara Menurut Musgrave	16
2.1.4 Teori Penerimaan Pemerintah	17

2.1.5 Belanja Modal	19
2.1.5.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal.....	19
2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal	21
2.1.6 Infrastruktur	23
2.1.6.1 Infrastruktur Jalan.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Hipotesis	33
2.4.1 Hubungan Belanja Modal dan Infrastruktur Jalan terhadap PDRB .	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	36
3.2 Rancangan Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis	37
3.5.1 Metode Regresi Data Panel	37
3.5.2.1 Model Penelitian	38
3.5.2.2 Pooled Least Square	39
3.5.2.3 Chow Test	40
3.5.2.4 Metode Fixed Effect	40
3.5.2.5 Metode Random Effect	41
3.5.2.6 Uji Hausman	41
3.5.2.7 Uji Statistik	42
3.5.2.8 Uji Statistik F	42
3.8.2.9 Uji Statistik T	43

3.8.2.10 Koefisien Determinasi	44
3.6 Definisi Operasional Variabel	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	45
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah	45
4.1.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	48
4.1.2.1 Perkembangan Panjang Jalan di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau	48
4.1.2.2 Perkembangan Belanja Modal di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau	50
4.1.2.3 Perkembangan PDRB di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau	51
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	52
4.2.1 Estimasi Model data Panel dengan Common Effect	52
4.2.2 Estimasi Model Data Panel dengan Fixed Effect Model	53
4.2.3 Estimasi Model Data Panel dengan Random Effect Model	54
4.2.4 Uji chow	55
4.2.5 Uji Hausman	55
4.2.6 Ikhtisar Pemilihan Model Akhir	56
4.3 Hasil Pengujian Statistik	58
4.3.1 Uji F	58
4.3.2 Uji T	59
4.3.3 Koefisien Determinasi	60
4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	61
4.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB	61
4.4.2 Pengaruh Panjang Jalan terhadap PDRB	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kota tahun 2007-2016.....	5
Tabel 1.2 2 Realisasi Belanja Modal Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau tahun 2007-2016	6
Tabel 1.3 Panjang Jalan Empat Kota di Sumatera Selatan tahun 2007-2016 ...	7
Tabel 4.1 Data Panjang Jalan Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau tahun 2007-2016	49
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Modal Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau tahun 2007-2016	50
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kota tahun 2007-2016.....	51
Tabel 4.4 Hasil Regresi Metode <i>Common Effect</i>	52
Tabel 4.5 Hasil Regresi Metode <i>Fixed Effect</i>	53
Tabel 4.6 Hasil Regresi Metode <i>Random Effect</i>	54
Tabel 4.7 Hasil Regresi Uji Chow	55
Tabel 4.8 Hasil Regresi Uji Hausman.....	55
Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Yaitu <i>Fixed Effect</i>	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Belanja Modal, Panjang Jalan (Km), Dan Pdrb (Juta Rupiah) Menurut Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2007-2016	69
Lampiran 2. Hasil Output Olah Data Dengan Eviews	71
Lampiran 3. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan 2007-2016(km)	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yuwono, 2005: 92). APBD di satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan dan transfer.

Untuk mewujudkan *good public and corporate governance*, otonomi daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005).

Belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU).

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Nugraeni, 2011: 4-5).

Anggaran belanja, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat di dalam Pasal 50 bahwa belanja modal termasuk dalam salah satu jenis belanja langsung. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini akan memberikan dampak secara langsung kepada pembangunan masyarakat di suatu daerah (Mangkoesoebroto 1994: 54).

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan operasional di daerah masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana

Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah (Halim 2004: 27).

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu (2005: 416) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRB per kapita) (Zaris, 2007: 82).

Tabel 1.1 Nilai PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kota tahun 2007-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kota Pagaralam	Kota Lubuk Linggau
2007	58.779,23	2.118,29	990,35	1.437,18
2008	60.665,28	2.334,28	992,18	1.645,27
2009	62.771,19	2.556,19	997,10	1.886,35
2010	65.798,16	2.887,15	1.189,36	2.196,45
2011	68.465,21	3.178,85	1.375,18	2.487,25
2012	70.090,31	3.496,88	1.641,56	2.943,70
2013	74.193,37	3.674,19	1.735,06	3.042,98
2014	78.079,09	4.097,01	1.814,40	3.235,62
2015	82.329,66	4.295,41	1.892,92	3.439,78
2016	87.088,35	4.587,79	1.974,61	3.645,48

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada setiap kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat terjadi apabila terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Mangkoesobroto (1994: 54) bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini akan memberikan dampak secara langsung kepada pembangunan masyarakat di suatu daerah. Belanja modal ini bersifat membangun dalam hal pembiayaan aset atau juga dapat dikatakan belanja modal menambah produktifitas dan meningkatkan *output* di suatu daerah, sehingga dapat dengan kata lain, belanja modal dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi atau dalam hal ini yang menjadi indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Modal Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau tahun 2007-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kota Pagaralam	Kota Lubuk Linggau
2007	309.993	202.872	151.135	104.069
2008	280.458	249.278	191.141	157.275
2009	250.954	200.516	178.566	135.894
2010	248.045	170.206	93.173	149.773
2011	274.642	115.123	150.506	185.98
2012	356.728	145.717	187.087	96.106
2013	532.626	191.573	164.911	390.058
2014	668.034	255.722	202.494	390.058
2015	606.555	282.464	276.894	266.742
2016	623.976	295.583	246.648	230.844

Sumber: www.djpk.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari webwww.djpk.go.id, belanja modal setiap kota mengalami naik dan turun. Belanja modal terendah terjadi di Kota Pagaralam sebesar Rp. 93.173 juta sedangkan belanja modal terbesar terjadi di Kota Palembang sebesar Rp. 668.034 juta.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.3 Panjang Jalan Empat Kota di Sumatera Selatan tahun 2007-2016 (km)

Tahun	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kota Pagaralam	Kota Lubuk Linggau
2007	974,67	392,12	556,57	531,01
2008	974,68	392,13	556,57	531,01
2009	974,69	391,62	556,57	542,55
2010	974,70	401,62	556,57	531,98
2011	1096,5	401,63	556,57	543,67
2012	974,67	401,64	581,80	563,29
2013	974,74	401,65	581,80	604,76
2014	796,33	401,66	581,80	644,05
2015	796,34	402,13	595,77	697,37
2016	145,69	402,13	595,77	736,66

Sumber: www.bps.go.id

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan menjadi semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan komunikasi dan mobilisasi antar daerah. Semakin baik kondisi jalan di suatu daerah baik kualitas

dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa antar wilayah. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Mobilitas penduduk dan modal cenderung akan menjadi semakin tinggi. Lebih jauh lagi, daerah-daerah sulit terjangkau atau terisolir akan menjadi terjangkau dan terbuka terhadap area lain.

Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau yang merupakan empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki penduduk yang cukup banyak dengan kemajuan pembangunan dan perekonomian yang cukup pesat. Empat kota tersebut selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan dan perekonomian yang cukup drastis yang menyebabkan meningkatnya transportasi yang melalui kota-kota tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika prasarana infrastruktur jalan yang memadai untuk kelancaran lalu lintas perekonomiannya.

Itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk membahas mengenai bagaimana suatu pertumbuhan jika dilihat dari belanja modal dan infrastruktur panjang jalan, bagaimana hubungan diantara ketiga variabel tersebut dan bagaimana pengaruh dari belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dari penjelasan di atas maka judul yang peneliti tentukan adalah “Pengaruh Belanja Modal Dan Infrastruktur Panjang Jalan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Empat Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuklinggau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi ilmiah bagi akademisi khususnya Teori-Teori Keuangan Daerah untuk menambah dan memperkaya bahan kajian teori-teori bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Hasil dari penelitian ini ialah agar memberikan informasi yang lebih jelas untuk menyempurnakan teori yang telah ada tentang masalah yang dibahas.
 - c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan bagi kalangan pendidikan maupun non pendidikan,

karena pada dasarnya yang dibahas dalam penelitian ini adalah bersifat keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba.
- Abdullah, Ryki. 2013. *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, 1976 – 2011*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Abimanyu. 2005. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY*. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Sumatera Barat.
- Austriana, Ida. 2005. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- BAPPENAS. 2015. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Gujarati, Damodar. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga. Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006. Depok: Universitas Indonesia.
- Hakim, Lukman. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Periode 2008-2012)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Hapsari, Tanjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2004-2009*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jhingan, M.L. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kurniawan, Agus *et al.* 2012. *Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat Tahun 2004-2010*. Universitas Padjajaran.

- Lipsey, Richard B dkk, 1992. *Pengantar Mikro ekonomi Intermediate*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'ruf, Yudhi Permadi. Jeluddin Daud. 2009. *Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Maryaningsih, Novi. Oki Hermansyah. 2014. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1994, “ *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi* “, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Nachrowi, D. 2006, *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugraeni. 2011. “*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*”. *Jurnal AKMENIKA UPY, Volume 8, 2011*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Prasetyo, Rindang Bangun. Muhammad Firdaus. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Tengah.
- Putri, Nurul Septiyani Eka. 2017. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Singgih. 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Gramedia.

Sibarani, M.H.M. 2002. *Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Edisi. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sukirno, Sardono. 2005. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.bi.go.id Diakses pada 8 Oktober 2017.

www.bps.go.id Diakses pada 23 Februari 2018

www.djpk.go.id Diakses pada 27 Februari 2018

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.

Winamo, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistik* : EView, Yogyakarta :UPP STIM YKPN.

Winanda, Ade Ayu. 2016. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandarlampung Periode 2003-2013*. Lampung: Universitas Lampung.

Wurarah, Rully Novie. 2011. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua Barat*. Universitas Airlangga.

Yuwono, Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia, Surabaya.

Zaris, Roeslan. 2007. *Perspektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: LPFE UI.